

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting merupakan persoalan kesehatan yang masih mengancam negara Indonesia hingga saat ini. Stunting menyerang anak yang kurang gizi dengan rentan waktu yang lama. Dampak stunting pada pertumbuhan anak dicirikan dengan tinggi anak yang berada dibawah standar usianya. Proses stunting dimulai saat janin dalam kandungan yang akan terlihat saat anak memasuki usia tahun kedua (Kemenkes RI, 2018). Stunting adalah indicator status gizi TB/U sama dengan atau kurang dari minus dua standar deviasi (-2SD) di bawah rata-rata standar atau keadaan dimana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lainnya (UNICEF, 2013).

Kekurangan gizi pada anak usia 0–2 tahun dapat menyebabkan dampak yang tidak dapat diperbaiki, berpengaruh terhadap kualitas hidup baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek, stunting dapat menghambat pertumbuhan fisik, menyebabkan postur tubuh tidak optimal saat dewasa, serta memengaruhi metabolisme dan perkembangan otak. Anak yang mengalami stunting juga berisiko memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah ketika remaja, karena gangguan pada sistem saraf yang dapat menurunkan tingkat kecerdasan. Oleh karena itu, pencegahan stunting sejak dini sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung secara optimal (Solihin, Anwar dan Sukandar, 2013). Sedangkan dampak jangka panjang akibat stunting adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan

disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Laporan WHO pada tahun 2020 menjelaskan 149,2 juta anak Indonesia yang mengalami stunting setara dengan 22 persen anak-anak balita di dunia. Menurut World Health Organization (WHO) Indonesia merupakan negara ketiga angka stunting tertinggi di Regional Asia Tenggara/South-East Asia Regional (SEAR) yaitu 36,4 persen pada tahun 2015-2017. Indonesia juga menjadi negara dengan angka prevalensi stunting tertinggi nomor dua setelah Timor Leste di Kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan angka 31,8 persen. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 di angka 24,4 persen, dan menurun kembali pada tahun 2022 prevalensi angka stunting Indonesia berada 21,6 persen. Namun demikian, angka stunting Indonesia masih melebihi dari standar WHO sebesar 20 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus stunting yang terjadi di Indonesia tergolong tinggi (Kemenkes RI, 2023).

Stunting menjadi salah satu rintangan negara Indonesia sebagai negara berkembang dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Bahaya dari balita stunting akan mempengaruhi perkembangan otak yang lambat akan berdampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak ini akan menghambat Visi Indonesia Emas 2045 yang digadang akan terjadi bonus demografi usia produktif 15-64 tahun mencapai 70 persen. Jika persoalan stunting tidak ditangani dengan cepat dan tepat, Indonesia akan kehilangan manfaat dari bonus demografi yang di gadang-gadang terjadi setelah 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045.

Penanganan stunting di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting, yang menetapkan kebijakan strategis dan kelompok sasaran guna mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Peraturan ini mendefinisikan percepatan penurunan stunting sebagai serangkaian upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kolaborasi multisektor di tingkat nasional, regional, hingga desa. Pemerintah juga mengadopsi pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting serta menerapkan lima pilar utama dalam percepatan penurunan stunting. Selain itu, guna memastikan implementasi kebijakan yang efektif, dibentuk tim percepatan penurunan stunting yang terdiri dari unsur pengarah dan pelaksana. Lima pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai berikut:

- a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia. Tingginya pertumbuhan penduduk yang terjadi di Jawa Tengah memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan adalah tersedianya tenaga kerja atau SDM yang melimpah untuk meningkatkan produktivitas nasional. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan dari tingginya pertumbuhan penduduk terjadinya stunting. Namun, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang berhasil menurunkan angka stunting dari tahun ketahun. Pada tahun 2018 data stunting di Jawa Tengah berada di angka 24,4 persen kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 18,3 persen, di tahun 2020 kasus stunting menurun menjadi 14,5 persen, kemudian pada tahun 2021 menjadi 12,8 dan terakhir pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali mencapai angka 11,9 persen (JawaPos, 2023). Dibalik keberhasilan Jawa Tengah dalam menurunkan angka prevalensi angka stunting, Provinsi Jawa Tengah masih termasuk dalam 12 provinsi prioritas pemerintah dalam percepatan penurunan angka stunting Indonesia untuk mencapai target kasus stunting di angka 14 persen pada tahun 2024.

Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah paling utara dan berbatasan langsung dengan lautan. Kabupaten demak terdiri dari 14 kecamatan. Terdapat empat kecamatan yang terletak di wilayah pesisir diantaranya Kecamatan Wedung, Kecamatan Bonang, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Sayung. Menurut Nontji (2002), wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut, ke arah darat meliputi bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin kaut dan intrusi garam sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh alami

yang ada di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar serta daerah yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan.

Kabupaten Demak menjadi salah satu kabupaten yang memiliki permasalahan stunting. Saat ini Kabupaten Demak menjadi salah satu kabupaten yang menjadi lokus prioritas pencegahan dan penanggulangan stunting. Prevalensi angka stunting di Kabupaten Demak di tahun 2021 diangka 25,5 persen dan mengalami penurunan di tahun 2022 mencapai 16,2 persen. Meski demikian Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan stunting pada tahun 2023 berada di bawah 10 persen. Kasus anak yang terdampak stunting di Kabupaten Demak tahun 2021 mencapai 4.215 anak. Dengan rincian data yang tersebar di 14 kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Kejadian Stunting di Kabupaten Demak Tahun 2021

Kecamatan	2021
Mranggen	207
Karangawen	193
Guntur	694
Sayung	427
Karang Tengah	154
Bonang	702
Demak	353
Wonosalam	406
Dempet	192
Kebonagung	87
Gajah	171
Karanganyar	130
Mijen	150
Wedung	349

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2021

Dari data tersebut menunjukkan tiga dari empat kecamatan pesisir memiliki kerawan stunting dengan kasus angka stunting tertinggi yaitu Kecamatan Sayung,

Bonang, dan Wedung jika dibandingkan dengan kawasan lainnya yang bukan pesisir.

Kabupaten Demak menjadi daerah langganan bencana banjir setiap tahunnya. Pada tahun 2023, banjir melanda Kabupaten Demak dan sebanyak 114 desa di 14 kecamatan terdampak dari banjir tersebut. Pada tahun 2023 ini Kecamatan Sayung dan Kecamatan Bonang merupakan kecamatan yang paling terdampak dari banjir rob di Kabupaten Demak. Total desa pada Kecamatan Sayung yang terdampak banjir sebanyak 17 desa sedangkan total desa yang terdampak banjir pada Kecamatan Bonang sebanyak 20 desa (Detiknews, 2023). Bencana banjir yang melanda Kabupaten Demak setiap tahunnya pasti memiliki dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat setempat khususnya terhadap lingkungan dan kesehatan. Dampak lingkungan dan kesehatan ini akan mempengaruhi kasus stunting yang terjadi di Kabupaten Demak khususnya wilayah yang terdampak besar dari bencana tersebut. Hasil temuan Inamah, dkk (2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sanitasi lingkungan dengan stunting yang terjadi pada balita di daerah pesisir Tumahelu. Tak hanya berdampak pada lingkungan, dampak banjir juga merusak fasilitas umum.

Kecamatan Sayung merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Demak yang memiliki batas geografis dengan Laut Jawa di utara, Kecamatan Karangtengah di timur, Kecamatan Mranggen di selatan, serta Kota Semarang di barat. Wilayah ini terdiri dari 20 desa, di mana sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan tambak sebagai sumber mata pencaharian utama. Sementara itu, Kecamatan Bonang juga termasuk dalam wilayah Kabupaten Demak dengan batas administrasi yang meliputi

Kecamatan Wedung di bagian utara, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mijen di timur, Kecamatan Karangtengah di selatan, serta berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah dan Laut Jawa di bagian barat.

Banyak peneliti yang telah membahas mengenai kasus stunting pada berbagai daerah di Indonesia khususnya di bagian pesisir. Harleli dan Irma (2023) melakukan penelitian kasus stunting pada daerah pesisir dan perdesaan Kabupaten Buton Utara menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir prevalensi stunting bersifat fluaktif dengan prevalensi tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 44,5 persen dan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 27,2 persen. Belum tercapainya target pemberian ASI (Air Susu Ibu) eksklusif pada balita di daerah pesisir dan perdesaan di Kabupaten Buton Utara periode 2016-2020. Dewi Sartina dan Arfah Husna (2022) melakukan penelitian stunting pada Kecamatan Kuala Pesisir menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi balita dengan kejadian stunting di Kecamatan Kuala Pesisir, Nangro Aceh Darusallam yakni faktor pemberian pola makan yang kurang asupan protein dan lemak. Mita Femidio dan Lailatul Muniroh (2020) melakukan penelitian hubungan antara pola asuh balita terhadap stunting pada wilayah pesisir Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh pemberian makan kategori sedang berisiko 10,37 kali lebih besar balita akan mengalami stunting dibandingkan dengan pola asuh pemberian makan kategori baik. Sefrina, Linda Riski, Ratih Kurniasari, and Milliyantri Elvandari (2023) melakukan penelitian penanganan stunting melalui pendidikan gizi kepada kader posyandu pada kawasan pesisir pantai karawang yang menghasilkan hasil penelitian bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan

pelatihan secara signifikan mampu meningkatkan pengetahuan gizi kader posyandu.

Penelitian mengenai stunting di Indonesia belum menyeluruh. Banyak penelitian yang meneliti tentang stunting di Indonesia, namun, sedikit penelitian yang memfokuskan mengenai stunting yang terjadi di wilayah pesisir khususnya pada daerah tinggi pertumbuhan penduduk seperti pulau Jawa. Sejauh ini penelitian stunting pada kawasan pesisir mayoritas ditemukan dengan studi kasus di luar Pulau Jawa. Hakikatnya Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk paling banyak di Indonesia dan lebih dari setengah populasi Indonesia menempati Pulau Jawa. Dengan demikian masalah kependudukan khususnya angka stunting di pesisir Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan daerah pesisir luar Pulau Jawa lainnya. Akan tetapi, masih sedikit penelitian yang membahas tentang stunting pada kawasan pesisir di Pulau Jawa termasuk salah satu kabupaten paling utara Pulau Jawa yakni Kabupaten Demak.

Sedikit penelitian yang membahas mengenai stunting di Kabupaten Demak khususnya pada kawasan pesisir. Penelitian terdahulu masih memfokuskan pada daerah-daerah yang bukan pesisir tetapi memiliki angka kasus stunting yang tinggi seperti pada daerah Kecamatan Guntur yang dilakukan oleh Damayanti dan Sindiyana (2021) yang menganalisis Faktor Penyebab Kejadian Stunting pada Balita Berusia 24-59 Bulan di Desa Tumuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020. Mayoritas penelitian stunting di Kabupaten Demak hanya meneliti tentang gizi yang dibutuhkan penderita stunting dan hubungan antara faktor-faktor penyebab terjadinya stunting atau hubungan antara variabel dengan studi kasus daerah kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Belum adanya

penelitian stunting di Kabupaten Demak yang memfokuskan pada strategi pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat dalam melakukan percepatan penurunan stunting di kawasan pesisir khususnya Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Sedikitnya penelitian yang meneliti kasus stunting di kawasan pesisir dan juga merupakan daerah rawan bencana banjir di Kabupaten Demak juga menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai resiko dampak jangka panjang bencana banjir yang datang setiap tahunnya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan stunting yang terjadi khusus di daerah pesisir rawan bencana banjir dengan studi kasus pada Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja problem dalam percepatan penurunan stunting pada kawasan pesisir rawan bencana di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Bonang?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak, Dinas Kesehatan, Dinpermasdes, Bappeda dan masyarakat setempat dalam percepatan penurunan stunting pada kawasan pesisir rawan bencana di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Bonang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis problem apa saja yang terjadi dalam percepatan penurunan stunting pada kawasan pesisir rawan bencana di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Bonang.

2. Menganalisis strategi-strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak, Dinas Kesehatan, Dinpermasdes, Bappeda dan masyarakat setempat dalam percepatan penurunan stunting pada kawasan pesisir rawan bencana di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Bonang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- Menambah pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca mengenai kasus stunting pada kawasan pesisir rawan bencana Kecamatan Sayung dan Kecamatan Bonang.
- Memperkaya pemahaman kepada pembaca mengenai problem yang terjadi dalam percepatan penurunan stunting pada kawasan pesisir rawan bencana Kecamatan Sayung dan Kecamatan Bonang.
- Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai strategi-strategi penanganan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak, Dinas Kesehatan, Dinpermasdes, Bappeda dan masyarakat setempat dalam percepatan penurunan stunting pada kawasan pesisir rawan bencana di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Bonang.
- Menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik dari segala aspek.

1.4.2. Manfaat Praktis

- Memberikan gambaran mengenai kasus stunting yang terjadi pada kawasan pesisir rawan bencana di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Bonang,
- Memberikan gambaran mengenai problem apa saja yang terjadi dalam percepatan penurunan stunting pada kawasan pesisir rawan bencana di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Bonang.
- Memberikan gambaran mengenai strategi yang digunakan dari berbagai *stake holder* yakni Pemerintah Kabupaten Demak, Dinas Kesehatan, Dinpermasdes, Bappeda dan masyarakat setempat dalam percepatan penurunan stunting pada kawasan pesisir rawan bencana di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Dibawah ini, peneliti akan memberikan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Pertama, penelitian tentang Strategi Akselerasi Penurunan Stunting Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan oleh Nur Susanti, dkk, tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dan program penanganan stunting telah dilakukan di tiga lokus wilayah pesisir kabupaten yang sebagian besarnya masih merupakan intervensi gizi spesifik dengan pembagian PMT pada ibu hamil, balita resiko tinggi, dan pelaksanaan posyandu untuk pengukuran balita. Selain itu adanya *awareness* dari pimpinan daerah dan komitmen dari Bupati, OPD Leading sektor, OPD lintas

sektor hingga lintas kepala desa melalui rembuk stunting. Adanya kepercayaan *mutih* pada masyarakat pesisir juga menyebabkan tingginya kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Pekalongan. Kondisi geografis yaitu terdampak rob sepanjang tahun juga merupakan ancaman bagi keberhasilan percepatan penanganan stunting di wilayah pesisir.

Kedua, penelitian tentang Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Stunting Pada Anak Balita oleh Raiy Putri Pratama Sari dan Maria Montessori pada tahun 2021. Studi tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah sedang melaksanakan empat program untuk mengatasi masalah stunting pada anak dan balita di Kenagryan, Kamban, Barat, Pesisil dan Selatan yaitu, (a) sosialisasi melalui sosialisasi mengenai stunting dan kader Posyandu, (b) pemberian suplemen gizi berupa informasi tambahan biskuit, telur, susu dll, dan (c) pendidikan ibu hamil dan anak usia dini yaitu pengembangan pola asuh yang baik agar tidak terjadi hambatan, (d) Pos Pos Gizi Nagari merupakan forum komunitas dimana beliau berpartisipasi. Dari seluruh program yang dilaksanakan untuk menurunkan stunting, masih belum efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan stunting. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa manfaat dari upaya yang dilakukan adalah memberikan edukasi dan pengetahuan tentang stunting kepada masyarakat, memperbaiki dan memperbaiki gizi anak, serta memantau tumbuh kembang anak.

Ketiga, penelitian tentang Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Wilayah Pesisir Mendan Belawan oleh Susilawati dan Nadia Hendra Pratama pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Kecamatan Medan Belawan mempunyai angka kejadian stunting tertinggi di Kota Medan. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki standar dalam melaksanakan kebijakan percepatan penurunan stunting, khususnya Peraturan Medan Berawan tentang Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2020 sejalan dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Peningkatan Gizi telah diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan penerapan strategi terpadu percepatan pencegahan stunting yang terintegrasi, dapat diketahui bahwa pelaksana strategi mempunyai pemahaman dan pemahaman yang baik mengenai tujuan penerapan strategi tersebut. Melihat Peraturan Promosi Terpadu Stunting di Kabupaten Medan-Belawan tahun 2020, sangat efektif jika dijadikan landasan dalam melaksanakan kebijakan penurunan stunting di wilayah pesisir Kabupaten Medan-Belawan oleh para pelaksana kebijakan.

Keempat, penelitian tentang Analisis Faktor Resiko Kejadian Stunting Pada Balita di Kawasan Pesisir Kabupaten Pinrang oleh Sutriana, dkk, pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh antara berat badan lahir rendah (BBLR) dengan kejadian stunting. Wanita yang lahir dengan berat badan lahir rendah juga berisiko lebih tinggi menjadi ibu dengan stunting dan lebih besar kemungkinannya untuk melahirkan anak dengan berat badan lahir sama dengan dirinya. Sedangkan ASI eksklusif, MP-ASI, pendidikan ibu, dan status ekonomi tidak berpengaruh terhadap kejadian balita stunting di wilayah pesisir kecamatan Suppa kabupaten Pinlang. Perlunya peran Dinas Kesehatan dan instansi lainnya untuk meningkatkan

penyediaan informasi dan komunikasi tentang stunting dan meningkatkan kesadaran para ibu tentang pentingnya memberikan ASI eksklusif dan MP-ASI kepada ibu dan ibu hamil melalui konseling dan perlunya intervensi fokus kesehatan ibu dan anak untuk mengurangi risiko berat badan lahir rendah dan panjang badan lahir pendek sehingga mengurangi risiko semakin banyak anak mengalami stunting.

Kelima, penelitian tentang Hubungan Sanitasi Lingkungan dengan Stunting pada Anak Balita di Daerah Pesisir Pantai Puskesmas Tumalehu Tahun 2020 oleh Inamah, dkk, pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanitasi lingkungan (fasilitas air bersih, SPAL, tempat sampah) memiliki status gizi mempunyai nilai $p\text{-value} < 0.05$. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kesehatan lingkungan yaitu pengelolaan air bersih, pengelolaan sanitasi, pengelolaan sampah, keluarga dan drainase, dengan Indeks Status Gizi Tuberkulosis/U di Wilayah Pesisir Puskesmas Tumahelu. Sanitasi yang buruk berkontribusi terhadap masalah gizi pada anak di bawah usia lima tahun. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan kesehatan lingkungan karena berdampak pada masalah gizi jangka panjang.

Keenam, penelitian tentang Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting oleh Erlanda dan Rahmadanik yang menjelaskan bahwa Proses *collaborative governance* dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya telah menjadi perhatian pemerintah karena yang pada tahun sebelumnya kasus stunting di Surabaya tinggi. Untuk menurunkan angka stunting ini, pemerintah berharap adanya

kerjasama antar masyarakat. Dalam menyusun strategi penurunan stunting melalui proses kolaborasi yang dimulai dari melakukan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses memberikan hasil yang sudah berjalan cukup baik dan efektif. Penurunan stunting di Kota Surabaya mengalami penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020 angka stunting mencapai 12.788 kasus, tahun 2021 menjadi 6.722 kasus dan tahun 2022 angka stunting menjadi 1.219 kasus. Tetapi tidak menutup kemungkinan angka stunting dapat naik kembali atau mungkin bisa turun drastis. Oleh karena itu, program stunting ini terus berlanjut serta stakeholder yang berkaitan membantu demi balita dan anak yang sehat

Ketujuh, penelitian tentang Peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu oleh Syamsuadi, dkk. yang menjelaskan bahwa Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan percepatan penurunan stunting dengan secara terstruktur dan menyeluruh seperti melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi, menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, menyelenggarakan rembuk stunting, memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi, memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa, meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi, melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan

publikasi angka stunting dan melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting secara periodik.

Kedelapan, penelitian tentang Pendidikan Kesehatan Kepada Nenek Pengasuh Dalam Mencegah Stunting Anak Usia 36 Bulan di Daerah Pesisir Pantai Kabupaten Probolinggo oleh Yessi Nur Endah Sary pada tahun 2020. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih umum di lokasi penelitian bahwa penitipan anak usia dini masih dikelola oleh nenek, sehingga menciptakan ikatan baru antara nenek dan cucu. Hasil penelitian menunjukkan 20 anak laki-laki (36 bulan) menderita stunting dan 22 anak perempuan (36 bulan) juga menderita stunting. Hal ini dimungkinkan karena rendahnya tingkat pendidikan pengasuh yakni nenek yang sebagian besar hanya mengenyam pendidikan dasar. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan seharusnya diberikan kepada nenek pengasuh. Di wilayah pesisir Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pendidikan kesehatan pada nenek pengasuh untuk mencegah stunting efektif memberikan kontribusi terhadap berat dan tinggi badan anak pada usia 36 bulan.

Kesembilan, penelitian tentang Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sigi yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah melakukan upaya percepatan penurunan stunting dengan melaksanakan pilar strategi penurunan stunting melalui penerapan 8 aksi konvergensi yang secara garis besar memperlihatkan terjadi penurunan persentase kasus stunting dalam kurun waktu satu tahun terakhir di tahun 2020 sebesar 16,59% turun menjadi 14,40% di tahun 2021. Upaya yang telah dilakukan melalui aksi konvergensi dapat terlihat dari seluruh kegiatan yang

dilaksanakan telah terencana, diarahkann dan dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas terutama untuk peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan gizi di 1000 hari kehidupan pertama.

Kesepuluh, penelitian tentang Peran Makanan Laut Sumber Protein dan Anak Stunting di Wilayah Pesisir Sulawesi Tenggara oleh Intan Ria Nirmala dan Lestari Octavia pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebiasaan makan dapat mempengaruhi status gizi anak. Pola makan dengan benar akan meningkatkan status gizi anak. Asupan gizi berbasis pangan lokal, merupakan kunci keberhasilan tumbuh kembang anak. Termasuk kontribusi lingkungan dalam proses pengambilan keputusan mengubah perilaku makan. Pada lokasi penelitian memiliki makanan laut melimpah sebagai sumber protein, namun konsumsinya sangat rendah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendidikan gizi yang dapat diintegrasikan ke dalam program perikanan dan program gotong royong lainnya yang menyasar orang tua dan anak untuk meningkatkan kesadaran pentingnya asupan makanan laut dalam program 1000HPK untuk mencegah keterbelakangan pertumbuhan.

Dari kesepuluh penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penelitian mengenai masih terlalu umum yang hanya menjelaskan pengaruh dan faktor penyebab dari stunting dan upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan percepatan penurunan stunting pada daerah-daerah di Indonesia. Belum ditemukan penelitian yang meneliti secara khusus fenomena stunting daerah pesisir yang rawan bencana banjir setiap tahunnya dan bagaimana peran dan strategi pemerintah serta

masyarakat dalam mengatasi percepatan penurunan stunting di kawasan pesisir rawan banjir seperti Kecamatan Sayung dan Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

1.6. Kerangka Berpikir

1.6.1. Stunting sebagai Isu Kebijakan

Secara Etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari Bahasa Yunani “polis” yang berarti negara. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang di inginkan (Widodo, 2007:13). Menurut Marbun (2007), kebijakan adalah serangkaian konsep dan prinsip yang digunakan sebagai panduan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu tugas, baik dalam pemerintahan, organisasi, maupun kepemimpinan. Marbun menekankan bahwa kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik utama: (1) Merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mana kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan resmi dalam sistem pemerintahan; (2) Bersifat mengikat dimana kebijakan publik harus dipatuhi oleh masyarakat karena memiliki kekuatan hukum; (3) Bertujuan untuk kepentingan umum dengan maksud kebijakan dirancang untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat luas; dan (4) Melibatkan proses yang kompleks artinya dalam pembentukannya, kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Dari pandangan Marbun, kebijakan publik bukan sekadar keputusan administratif, tetapi merupakan alat utama

pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial demi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan juga berisi tujuan, cita-cita, dan pedoman yang membantu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan Subarsono (2005) menulis dalam bukunya bahwa menurut Thomas Dye (1981), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Raksasatya dalam Lubis (2007), kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu: (1) identifikasi dari tujuan yang ingin di capai, (2) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, (3) penyediaan berbagai masukan untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi kebijakan publik. Menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Ealau dan Prewit (1995), kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsisten dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Jones juga menganalisis komponen-komponen pengertian kebijakan yang terdiri dari: (a) *goal* atau tujuan yang diinginkan, (b) *plan* atau proposal, (c) *program*, (d) *decision* atau tindakan-tindakan dan (e) *effect* atau akibat-akibat dari rencana.

Menurut WHO (2015), stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi berulang, ditandai dengan tinggi atau panjang badan yang berada di bawah standar pertumbuhan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

(2018) mendefinisikan stunting sebagai kondisi gagal tumbuh yang berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Akibatnya, anak yang mengalami stunting cenderung memiliki postur tubuh lebih pendek dibandingkan anak seusianya serta mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognitif. Kekurangan gizi yang menjadi faktor utama penyebab stunting umumnya terjadi sejak masa kehamilan hingga periode awal kehidupan anak, yang dikenal sebagai 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Tiga alasan pencegahan dan penanggulangan stunting di Indonesia menjadi persoalan serius dari aspek kebijakan menurut Made Agus Sugianto (2021), yaitu; (1) prelevensi angka stunting di Indonesia yang masih melebihi ambang batas yakni ($>20\%$) yang menunjukkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting perlu evaluasi lebih dalam; (2) peran aktif masyarakat yang sangat dibutuhkan. Dalam mendukung kebijakan pemerintah; (3) salah satu visi Presiden Republik Indonesia adalah fokus pada pembangunan sumber daya manusia dengan menyediakan jaminan kesehatan ibu hamil, bayi, balita, dan anak sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting dengan target mencapai 14 persen pada tahun

2024. Kebijakan ini disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 guna memperkuat implementasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2018-2024. Strategi tersebut mencakup berbagai upaya, antara lain menurunkan angka kejadian stunting, meningkatkan kualitas persiapan kehidupan berkeluarga, memastikan pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal, memperbaiki pola asuh anak, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Selain itu, kebijakan ini juga menitikberatkan pada peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak sebagai langkah preventif dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

1.6.2. Penyebab Stunting dan Berbagai Strategi Penanganannya

Menurut Kementerian Kesehatan (2022), stunting merupakan kondisi yang disebabkan oleh ketidakcukupan asupan gizi selama masa kehamilan hingga usia balita. Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap stunting antara lain rendahnya tingkat pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum kehamilan serta selama masa nifas, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan seperti pemeriksaan antenatal dan postnatal, serta keterbatasan ketersediaan pangan bergizi. Selain itu, kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai dan air bersih juga menjadi determinan penting yang berpengaruh terhadap meningkatnya risiko stunting pada anak.

Sedangkan menurut Inamah (2021), penyebab terjadi stunting di pesisir Tumahelu adalah sanitasi lingkungan yang buruk meliputi pengolahan air bersih, pengelolaan MCK, pengelolaan sampah keluarga dan drainase. Sanitasi

lingkungan yang buruk ini akan berdampak pada masalah gizi balita secara jangka panjang.

Menurut Mardihani & Husain (2021), penyebab terjadinya stunting pada pesisir Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara adalah pengetahuan ibu balita tentang stunting yang masih sangat kurang. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih rendah. Pengetahuan lokal ibu balita mengenai stunting diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu: (1) stunting dianggap sebagai suatu penyakit yang berkaitan dengan pertumbuhan anak, (2) stunting merupakan hal yang wajar terjadi pada balita akibat dari gen atau keturunan (3) stunting merupakan cacangan pada anak. Menurut Soesanti (2019), penyebab terjadinya stunting di pesisir Kabupaten Sumenep adalah pemberian ASI pada balita 6 bulan yang tidak eksklusif dan anak-anak yang baru diperbolehkan makan ikan setelah berusia lebih dari satu tahun atau pada saat anak sudah bisa jalan. Kurangnya pemberian sumber protein seperti ikan laut baik secara kualitas dan kuantitas dapat menjadi faktor yang menyebabkan anak mengalami stunting.

Menurut Susanti (2022), penyebab terjadinya stunting pada wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan adalah adanya kepercayaan *mutih* pada masyarakat pesisir. Kepercayaan ini menyebabkan tingginya kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Pekalongan. Menurut Handayani (2022), daerah pesisir Pantai kaya akan ikan hasil laut lain yang mampu untuk mendukung pencegahan stunting pada balita jika benar-benar diberikan secara optimal, akan tetapi selama ini mayoritas hasil laut justru diperjual belikan keluar

daerah dengan alasan harga yang tinggi tanpa memperdulikan kesehatan dan status gizi balita yang tinggal di daerah setempat.

Tingginya angka stunting seharusnya menjadi *awareness* dari seluruh *stakeholder* terkait. Dari kasus stunting yang terjadi di pesisir Medan Belawan, Susilawati & Pratama (2023), menunjukkan bahwa dari landasan implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting yang terintegrasi dapat dinilai pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Sari & Montessori (2021), hambatan dari pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah dalam menaggulangi stunting adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan yang menyangkut pencegahan stunting.

Menurut Aryastami & Taringan (2017), untuk mencegah masalah stunting dibutuhkan upaya yang bersifat holistik dan saling terintergrasi. Perlu adanya diseminasi informasi dan *advocacy* oleh unit teknis kepada *stakeholders* lintas sektor dan pemangku kepentingan lain pada tingkatan yang sama. Untuk jajaran struktural kebawahnya perlu dilakukan *knowledge tranfer* dan edukasi agar mampu menjelaskan dan melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat.

1.6.3. Stunting dan Irisan Persoalan Sosial Akibat Bencana Banjir

Bencana banjir datang tidak dapat diperkirakan dan akan merugikan masyarakat yang terdampak. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat bencana banjir adalah rusaknya lingkungan tempat tinggal. Diperlukannya

upaya sanitasi lingkungan pasca banjir untuk mengembalikan lingkungan menjadi lingkungan yang bersih kembali. Jika upaya sanitasi ini tidak secara langsung dilakukan pasca bencana banjir, dampak dari kebersihan lingkungan dan kesehatan akan dirasakan oleh penduduk sekitar.

Anak dengan higienitas sanitasi yang cukup berisiko 4,92 kali untuk mengalami stunting. Sanitasi yang buruk akan menyebabkan anak lebih mudah terserang penyakit infeksi yang akan mempengaruhi status gizi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti, *et. al* (2019), anak kelompok stunting memiliki kebiasaan bermain air banjir rob tanpa alas sepatu, anggota keluarga tidak memiliki kebiasaan mencuci tangan dan sabun setelah beraktivitas, orang tua masih belum sadar akan keamanan pangan untuk anak dan kebersihan alat makan, serta dari segi lingkungan kebersihan lingkungan tempat tinggal belum terjaga dikarenakan rumah masih tergenangi air rob sehingga lantai rumah lembab, ventilasi rumah yang kurang, dan ketersediaan sumber air bersih yang terbatas. (Yuniarti, *et. al*, 2019).

Menurut Yuniarti, *et. al* (2019), kejadian infeksi yang menjadi risiko terjadinya stunting adalah kejadian diare dan kejadian ISPA. Anak yang memiliki riwayat penyakit diare berisiko 13,33 kali untuk terjadi stunting dan anak yang memiliki riwayat penyakit ISPA memiliki risiko 7,01 kali untuk terjadi stunting. Kejadian diare pada daerah rob dapat terjadi karena kondisi higienitas dan sanitasi lingkungan yang kurang dan terdapat beberapa daerah banjir rob yang mengalami kesulitan air bersih. Sedangkan penyakit ISPA juga terjadi pada daerah rob disebabkan karena kondisi rumah yang kotor dan adanya genangan air rob menjadikan rumah sangat rentan dengan berbagai macam

penyakit. Serta kualitas udara di dalam rumah yang lembab dapat memicu penyakit menular melalui udara seperti ISPA. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati, Raharjo dan Sari, (2015), tiga faktor yang secara bersama-sama mempengaruhi stunting anak usia enam sampai 36 bulan, yaitu penyakit infeksi, ketersediaan pangan dan sanitasi lingkungan dan yang paling dominan adalah penyakit infeksi paling sering adalah ISPA dan diare.

Terdapat kaitan antara terjadinya bencana alam dan gizi masyarakat. Menurut Ade Irma (2019), di Kecamatan Secanggang menunjukkan bahwa kesehatan lingkungan memiliki andil dalam kejadian stunting pada anak karena terbatasnya air bersih yang digunakan oleh para ibu untuk memasak makanan.

1.6.4. Tantangan Penanganan Stunting di Daerah Rawan Bencana

Tantangan pertama, penanganan stunting di daerah rawan bencana adalah letak geografis sebagai kawasan pesisir yang menjadi daerah rawan bencana banjir setiap tahunnya. Banjir yang datang setiap tahunnya akan berdampak pada rusaknya lingkungan sekitar yang menjadi tempat tinggal warga pesisir. Lingkungan rusak yang terjadi karena banjir akan memperbesar resiko terjadinya stunting pada anak. Penelitian yang dilakukan Rodriguez-Llanes, *et.al.* (2016), menunjukkan anak-anak di India yang berada di wilayah rawan banjir yang merupakan salah satu bencana hidrimeteorologi akibat perubahan iklim lebih banyak menderita kekurangan gizi dibandingkan daerah yang minim banjir.

Tantangan kedua yang akan dihadapi adalah pola perilaku masyarakat setempat. Adanya budaya dan kepercayaan menyimpang yang dipercayai lama

oleh masyarakat pesisir setempat. Anderso dalam Mapadin (2006), memandang kebiasaan makanan merupakan kompleks keseluruhan dari aktifitas yang berhubungan dengan kegemaran, dan ketidaksukaan pada suatu jenis makanan, pepatah-pepatah rakyat, kepercayaan, larangan-larangan dan takhyul yang berhubungan dengan produksi, persiapan pengolahan makanan dan konsumsi makanan sebagai kategori dari kebudayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti, dkk (2022), pada wilayah pesisir Pekalongan menunjukkan bahwa mitos *mutih* masih sering dipercaya oleh sebagian besar masyarakat pesisir. Penelitian yang dilakukan Mardihani dan Husain (2021), menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat pesisir Mlonggo Kabupaten Jepara terhadap pantangan makanan yang cenderung menghindari konsumsi ikan laut, cumi, udang dan terong saat hamil. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan adanya kebiasaan orang tua dalam memberikan makanan terhadap anaknya berdasarkan pada kesukaan dan ketidaksukaan, sehingga kurang memperhatikan kualitas gizi yang terkandung dalam makanan.

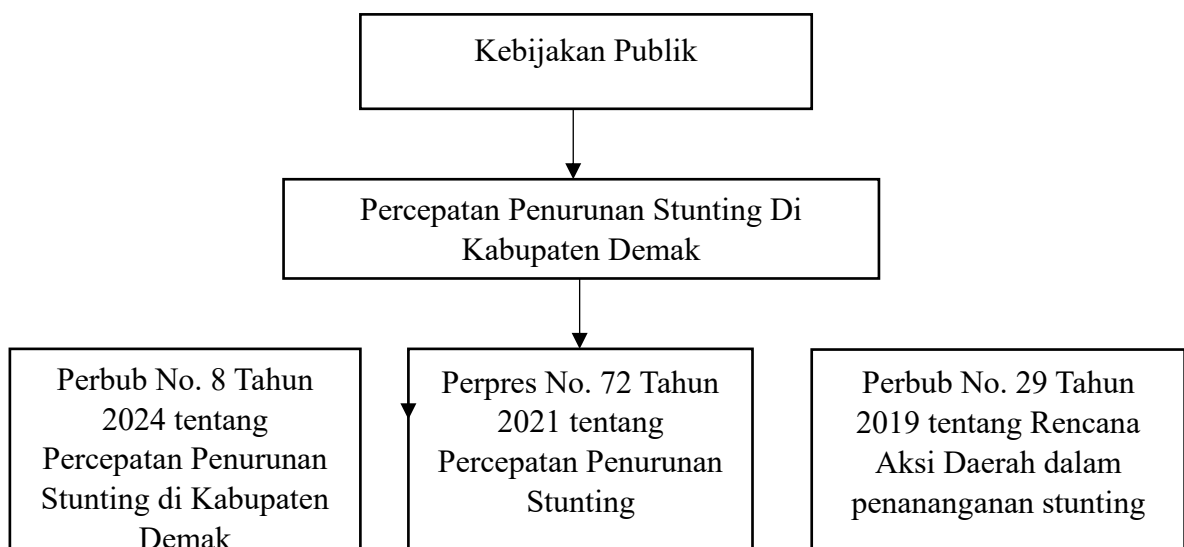
Tantangan ketiga, minimnya partisipasi masyarakat dalam mengatasi penurunan stunting pada daerah rawan bencana. Menurut Mikkelsen (2003), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Subandiyah (1982), menyatakan bahwa partisipasi dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu; (a) partisipasi dalam pengambilan keputusan, (b) partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain, dan (c) partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) atau keterlibatan warga dapat dilihat dalam empat tahap yakni:

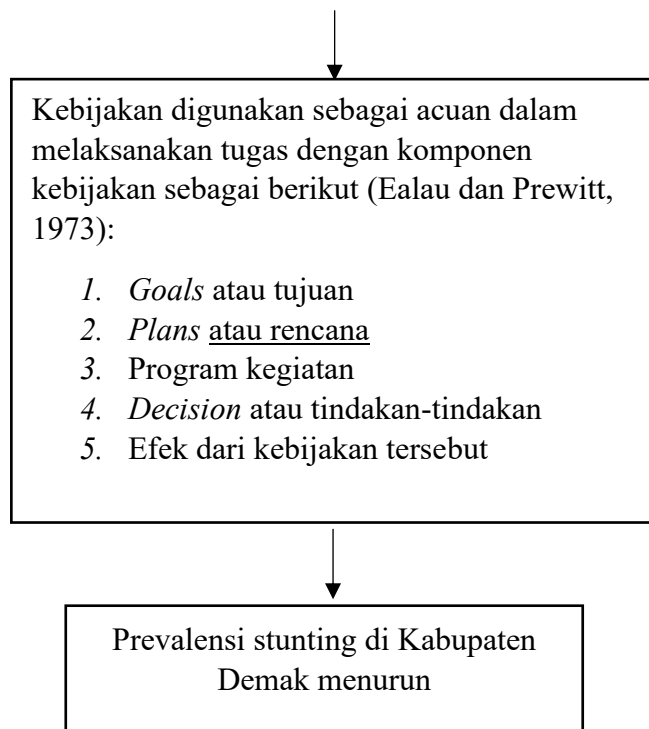
- a. Tahap *Assesmen*. Pada tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam melihat permasalahan.
- b. Tahap Alternatif Program atau Kegiatan. Tahap ini melibatkan masyarakat untuk berfikir mengenai problematika yang mereka hadapi serta cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.
- c. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan. Tahapan ini masyarakat dilibatkan dalam melaksanakan program yang sudah dirancang agar terlaksanan dengan baik.
- d. Tahap Evaluasi. Tahapan ini masyarakat dan petugas dilibatkan dalam pengawasan terhadap program yang berjalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryono dan Merlina (2021), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pencegahan stunting di Desa Singaparna Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Patisipasi masyarakat dilakukan hanya pada tahap pemikiran alternatif program dan tahap evaluasi.

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Kerangka Pemikiran





1.7.2. Kerangka Konsep

Tabel 1. 2 Kerangka Konsep Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator
Kebijakan Pemerintah dalam percepatan penurunan stunting di wilayah rawan bencana	<i>Goals</i> atau tujuan yang akan dicapai dan diinginkan dalam melakukan kebijakan penanganan stunting yang dilakukan.	Adanya target capaian pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan.
	<i>Plans</i> atau rencana yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dari berbagai wilayah yang ada	1. Adanya diskusi dengan mengidentifikasi masalah untuk menentukan rencana program

		2. Penetapan sasaran atau subjek dari pelaksanaan kebijakan 3. Koordinasi antar tingkat lembaga
	Program	Penentuan program dalam kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan
	<i>Decision</i>	Pelaksanaan dari program-program yang telah ditentukan untuk mencapai target capaian.
	Efek	Dampak atau hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap sasaran atau subjek kebijakan yang telah ditetapkan.

Sumber: Diolah oleh penulis.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan judul Problem dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting Di Kawasan Pesisir Rawan Bencana: Studi Kasus Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2016:3), metode penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi Langkah-langkah beberapa dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Menurut Denzin & Lincoln

(1994), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson (1968), penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:3), penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lainnya yang kemudian dijabarkan kedalam laporan penelitian. Pada penelitian ini, fenomena yang ada berupa bentuk, karakteristik, aktivitas, perubahan, hubungan, kesamaan serta perbedaan antara fenomena yang satu dengan lainnya. Metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif digunakan karena dapat menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran masalah atau hambatan yang dihadapi serta strategi yang dilakukan para pelaku kebijakan dalam percepatan penurunan angka stunting pada kawasan pesisir rawan bencana dengan studi kasus Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini sebagai narasumber maupun informan yang memberikan informasi mengenai topik dan persoalan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan menentukan dan memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teknik ini digunakan dalam penelitian ini dengan maksud peneliti akan mendapatkan data dari sumber yang dianggap relevan dan informatif mengenai topik tersebut. Berikut ini adalah subjek dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak khususnya ibu hamil dan ibu menyusui
- b. Pemerintah Kabupaten Demak Jawa Tengah
- c. Bappeda Demak Jawa Tengah
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinpermasdes dan PPKB) Kabupaten Demak
- e. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Jawa Tengah

1.8.4. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi. Terdapat dua jenis sumber data yang akan digunakan yaitu:

- a. Data Primer

Jenis data primer merupakan data yang sumbernya diperoleh secara langsung. Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file (Umi Narimawati, 2008). Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi yang mana kedua data

tersebut diperoleh tanpa adanya perantara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari lapangan sesuai dengan subjek penelitian yang telah ditentukan yaitu masyarakat dan pemerintah Kabupaten Demak, Bappeda, Dinpermasdes, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Menurut Sugiono (2008), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder bersifat mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, dokumen, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan teknik mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber/ informan. Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan ini diharapkan dapat menjawab persoalan atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada seluruh subjek penelitian terkait hambatan yang di hadapi serta strategi penanganannya terhadap percepatan penurunan angka stunting di wilayah kawasan pesisir rawan bencana di Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

b. Obeservasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian dimana peneliti mencatat informasi-informasi penting sesuai kesimpulan yang disaksikan selama penelitian di lapangan. Observasi pada penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati bagaimana hambatan yang terjadi dan strategi yang dilakukan oleh seluruh subjek penelitian terkait hambatan yang di hadapi dan juga strategi penanganannya terhadap percepatan penurunan angka stunting di wilayah pesisir rawan bencana di Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung di Kabupaten Demak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen atau data yang dimiliki oleh informan.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (dalam Basrowi & Suwandi, 2008), merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian besar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dari teknik analisis data yang dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang diperoleh di lapangan kepada hal-hal yang penting. Reduksi data berguna untuk menyederhanakan serta mentransformasikan data kualitatif ke dalam berbagai catatan melalui seleksi data. Menurut Basrowi & Suwandi (2008), reduksi data adalah proses analisis yang dilakukan untuk menggolongkan

data-data yang dianggap penting oleh peneliti sebab data yang didapat di lapangan masih bersifat kasar dan perlu dianalisis dengan maksud agar data-data yang diperoleh sejalan dengan masalah yang akan disajikan oleh peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan Kumpulan informasi yang dapat dimungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasa berupa teks bersifat naratif. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti agar data penelitian mudah dipahami. Penelitian ini berupaya untuk menyajikan data yang terkait dengan permasalahan dan strategi yang dilakukan oleh beberapa sektor dalam menurunkan angka stunting di kasawan pesisir rawan bencana di Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahap akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan harus didukung oleh data-data atau bukti yang valid kebenarannya. Kesimpulan ini merupakan inti atau pokok dari temuan penelitian yang akan dilakukan dan bisa disertai dengan pendapat peneliti. Penarikan kesimpulan harus sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Dari penelitian ini berupaya untuk menarik kesimpulan dari temuan penelitian tentang permasalahan dan strategi yang dilakukan oleh beberapa sektor dalam menurunkan angka stunting di kasawan pesisir rawan bencana di Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

1.8.7. Kualitas Data

Kualitas data merupakan aspek krusial dalam penelitian karena menentukan validitas dan reliabilitas hasil analisis. Menurut Sugiyono (2017), kualitas data dalam penelitian ditentukan oleh akurasi, konsistensi, dan relevansi data yang dikumpulkan. Data yang berkualitas harus memenuhi standar keabsahan, baik dari segi validitas internal, yang memastikan bahwa data benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, maupun validitas eksternal, yang memungkinkan generalisasi hasil penelitian. Selain itu, reliabilitas data juga menjadi faktor penting, di mana data yang diperoleh harus konsisten apabila dikumpulkan kembali dalam kondisi yang sama. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan data, peneliti harus memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian serta dilakukan dengan teknik yang sistematis dan terkontrol guna meminimalkan bias dan meningkatkan objektivitas hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Triangulasi data merupakan metode verifikasi yang melibatkan penggunaan berbagai sumber, teknik, atau perspektif dalam mengumpulkan dan menganalisis data guna meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian (Patton, 1999). Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan informan kunci, dokumentasi terkait, serta observasi langsung di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat meminimalkan bias, mengkonfirmasi konsistensi temuan, serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penerapan

triangulasi data menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat akurasi dan kredibilitas yang tinggi.